

ANALISIS KEBUTUHAN SARANA PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BEKASI

Ir. Sutaryo, M. Si^{1*}, Rusbianto Arumbi¹

¹ Prodi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik
Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kota Bekasi dengan meneliti tentang kebutuhan sarana pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan memprediksi kedepannya karena akibat perkembangan dan pertumbuhan penduduk yang terus bertambah setiap tahun. Disisi lain Kota Bekasi berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan SMA semakin meningkat sehingga perlu dilakukan analisis terhadap kebutuhan sarana Pendidikan Sekolah Menengah Atas. Salah satu pendekatan analisis yang digunakan mencakup : analisis kebutuhan ruang pada Sekolah, dan analisis aksesibilitas. Selanjutnya untuk analisis kebutuhan ruang kelas dengan melihat dari parameter jumlah sekolah rombongan yang ada dan jumlah range umur 15-19 Tahun (SMA, SMK, MA), dan sarana penunjang dilihat pada sisi transportasi/rute angkutan untuk mengantar murid dari permukiman ke tempat sekolah yang telah tersebar di Kota Bekasi.

Hasil analisis yang dilakukan peneliti terkait kebutuhan sarana pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Bekasi adalah jumlah fasilitas sudah merata di Kota Bekasi, namun jumlah sekolah dan eksisting tidak sama karena jumlahnya sudah melebihi dari jumlah fasilitas pendidikan yang dibutuhkan. Oleh karena itu jumlah fasilitas dengan jumlah murid tidak seimbang artinya bahwa jumlah murid lebih sedikit dari pada jumlah sekolah. Hal ini perlu ada upaya dengan melakukan pemerataan distribusi murid yang secara merata atau untuk sekolah yang di bawah ketentuan harus merger/kerjasama dengan sekolah lain untuk pemenuhan murid pembelajar yang ada.

Kata kunci: Kebutuhan Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Atas

PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan wilayah Kota Bekasi yang telah mengalami peningkatan status yaitu sejak ditetapkan sebagai Kota Administratif meliputi 4 Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981. Kemudian meningkat status Kota Bekasi menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi melalui Undang - undang Nomor 9 Tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 10 Maret 1997 dengan pemekaran wilayah administrasi menjadi 8 kecamatan. Kemudian sejak tahun 2001 wilayah administrasi Kota Bekasi dimekarkan menjadi 10 Kecamatan dan 52 Kelurahan. Sementara pada tahun 2004 administrasi Kota Bekasi dimekarkan

kembali menjadi 12 Kecamatan dan 56 Kelurahan.

Didasarkan pada tinjauan terhadap Kebijakan Tata Ruang Wilayah Makro yang tertuang baik dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat, maupun Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabek, serta posisi wilayah Kota Bekasi yang berbatasan dengan wilayah DKI Jakarta dan memiliki peran sebagai pengimbang (counter magnet) ibukota Negara Republik Indonesia (Jakarta), maka berbagai kebijakan pembangunan yang digariskan di Kota Bekasi berorientasi untuk kepentingan nasional (terutama Jakarta) (Sutaryo, 2017). Kebijakan pembangunan tersebut umumnya sangat strategis dan

dominan, sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dan pembangunan di Kota Bekasi. Berkembangnya di wilayah Kota Bekasi telah mengalami peningkatan jumlah penduduk yang berasal dari pendatang atau pun dari dalam sehingga terjadinya skala pelayanan umum pendidikan (SMA) yang harus merata pada setiap kecamatan.

Pendidikan SMA di wilayah Kota Bekasi mampu mengakomodasi penduduk usia sekolah yang jumlahnya terus bertambah. Dilihat jumlah sekolah Menengah Atas pada Tahun 2016 mencapai 246 buah (SMA, SMK, MAN), dengan jumlah penduduk 2.384.413 jiwa dan rata-rata usia sekolah 15-19 tahun sejumlah 242.879 jiwa. Jika dihitung seluruh daya tampung setiap kelas (rombongan belajar) maksimal diisi oleh 36 siswa dengan jumlah rombel untuk kelas 10 (SMA/SMK/MA) maksimal 12 rombel. Dengan demikian maksimal penerimaan siswa per sekolah adalah 432 siswa (36 siswa x 12 rombel).

Apabila ditinjau dari sebaran sarana pendidikan, maka sarana pendidikan di Kota Bekasi masih mengelompok di setiap kecamatan. Ternyata jumlah sekolah swasta lebih banyak dari pada jumlah sekolah negeri, yang tentu kondisi ini sangat mempengaruhi terhadap skala pelayanan dan aksesibilitas sarana pendidikan di Kota Bekasi. Ditinjau dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kota Bekasi dari aspek pendidikan perlu didorong untuk peningkatan pendidikan masyarakat, namun disisi lain masih perlunya peningkatan kualitas sarana pendidikan di Kota Bekasi. Untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah atas yang bermutu dan terjangkau bagi semua penduduk, melalui pendidikan formal SMA atau bentuk pendidikan lain yang sederajat, program pendidikan menengah atas didorong untuk mengantisipasi meningkatnya lulusan sekolah menengah pertama

sebagai dampak positif wajar Dikdas 12 tahun.

METODE PENELITIAN

Water Christaller (dalam Nurmala Dewi, 1997), ahli geografi berkebangsaan Jerman, mengatakan bahwa sebagai kawasan yang berpengaruh luas terhadap wilayah-wilayah di sekitarnya, pusat pertumbuhan dapat dicitrakan dengan titik-titik simpul yang berbentuk geometris heksagonal (segi enam). Wilayah segi enam itu merupakan wilayah-wilayah yang penduduknya terlayani oleh tempat sentral yang bersangkutan. Tempat-tempat sentral yang dimaksud dapat berupa pusat-pusat perbelanjaan, kota, atau pun pusat-pusat kegiatan lainnya. Oleh tempat-tempat sentral itu, wilayah atau tempat-tempat lain di sekitarnya akan tertarik. Misalnya, ibukota provinsi dapat menarik beberapa kota atau ibukota kabupaten, ibukota kabupaten menarik beberapa kecamatan, dan seterusnya secara hierarkis (Begawatsari, 2016).

Penjelasan model Christaller tentang terjadinya model area pelayanan heksagonal adalah Model Pelayanan Heksagonal Christaller. Mula-mula terbentuk area pelayanan berupa lingkaran-lingkaran. Setiap lingkaran memiliki pusat dan menggambarkan threshold. Lingkaran-lingkaran ini tidak tumpang tindih seperti pada (gb. A) Kemudian digambarkan lingkaran-lingkaran berupa range dari pelayanan tersebut yang lingkarannya boleh tumpang tindih (gb. B) Range yang tumpang tindih dibagi antara kedua pusat yang berdekatan sehingga terbentuk areal yang heksagonal yang menutupi seluruh dataran yang tidak lagi tumpang tindih (gb. C).

Tiap pelayanan berdasarkan tingkat ordenya memiliki heksagonal sendiri-sendiri. Dengan menggunakan $k=3$, pelayanan orde I lebar heksagonalnya adalah 3 kali heksagonal pelayanan orde II. Pelayanan orde II lebar heksagonalnya adalah 3 kali heksagonal pelayanan orde III, dan seterusnya. Tiap heksagonal memiliki pusat yang besar kecilnya sesuai

dengan besarnya heksagonal tersebut. Heksagona yang sama besarnya tidak saling tumpang tindih, tetapi antara heksagonal yang tidak sama besarnya akan terjadi tumpang tindih (gb. D).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Indeks Sentralitas Marshall

Analisis indeks sentralitas marshall dipergunakan untuk mengetahui jenis fasilitas dan jumlah penduduk yang dilayani serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi yang menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di Kota Bekasi. Analisis indeks sentralitas marshall digunakan untuk memberikan bobot pada fasilitas yang ada. Dengan analisis ini dapat ditentukan orde dari masing- masing

Kecamatan di Kota Bekasi. Untuk menentukan nilai sentralitas bobot dapat dihitung dari persamaan berikut:

$$C = tT$$

C = Bobot dari atribut suatu fasilitas

T = Nilai sentralitas gabungan

T = Jumlah total atribut fasilitas

Setelah mengetahui nilai sentralitas, kita dapat menentukan indeks sentralitas dengan mengalikannya dengan jumlah fasilitas yang ada. Berdasarkan range yang kemudian dapat ditentukan orde (tingkatan) masing-masing Kecamatan.

Perhitungan Indeks Sentralitas Marshall Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas

Tabel 1 Hasil Analisis Indeks Sentralitas Orde di Kota Bekasi Tahun 2016

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Jumlah Fasilitas Pendidikan SMA,SMK,MA	Orde
1	Pondokgede	266,726	40.03	I
2	Jatisampurna	104,324	8.58	III
3	Pondok Melati	121,389	8.39	III
4	Jatiasih	205,934	11.18	III
5	Bantargebang	96,384	29.58	II
6	Mustika Jaya	161,648	24.89	II
7	Bekasi Timur	265,635	20.23	III
8	Rawalumbu	217,211	36.55	II
9	Bekasi Selatan	198,317	51.39	I
10	Bekasi Barat	273,454	24.89	II
11	Medansatria	152,437	15.18	III
12	Bekasi Utara	320,954	19.43	III
	Jumlah	2,384,413	290	-

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017

Keterangan :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Orde} &= 1+3,3 \text{ Log } n \\ &= 1 +3,3 \text{ Log } 5 \\ &= 3.30 \text{ (3 Orde)} \end{aligned}$$

$$\text{Orde tertinggi} = 51,39$$

$$\text{Orde Terendah} = 8,39$$

$$\text{Interval} = 14,27$$

Orde

I : 37 - 51,39 Pondok Gede,Bekasi Selatan

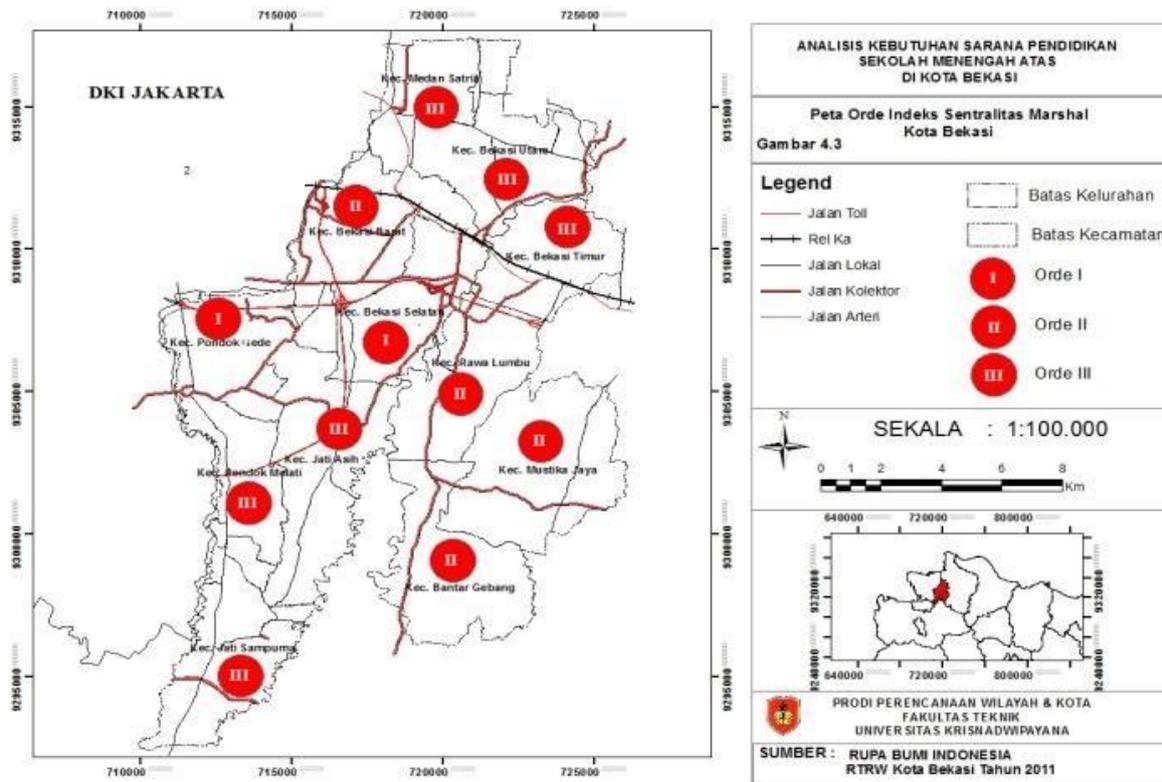
II : 22.85 - 37 Bekasi Barat,Mustika Jaya,bantar Gebang,Rawa Lumbu

III : 8,58 - 22.85 Bekasi Timur, Bekasi Utara, Medan Satria, Jati Asih, Pondok Melati, Jatisampurna.

Berdasarkan analisis ,Kecamatan yang mempunyai orde I yaitu Kecamatan Pondok Gede dan Bekasi Selatan dengan nilai orde 51,39 dan 40,03 dengan orde antara 37 - 51,39 .Sedangkan Kecamatan yang berada pada orde II yaitu Kecamatan Bekasi Barat,Mustika Jaya,Bantar Gebang,Rawa Lumbu dengan nilai orde 24.89 , 24.89 , 29.58 , 36.55 dan terakhir dengan nilai orde III dengan Nilai orde

dari 8,58 – 22.85 Yaitu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi Utara, Medan Satria, Jati Asih, Pondok Melati dan Jatisampurna dengan nilai orde 20.23 , 19.43, 15.18, 11.18,

8.39 dan 8,58 untuk lebih jelasnya hierarki indeks sentralitas dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 Peta Orde Indeks Sentralitas Marshall Kota Bekasi

Analisis Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Dari penentuan fasilitas yang di lakukan oleh analisis indeks sentralitas marshal perlu di lakukan juga analisis kebutuhan ruang kelas untuk mengetahui sampai mana tingkat daya tampung sekolah yang ada di kota bekasi untuk menentukan daya dukung pelayanan per ruang kelas perlu adanya standar yang harus menjadi acuan pada penghitungan jumlah pelayanan melalui perhitungan ruang kelas Permendikbud mengeluarkan

Peraturan tentang Zonasi dan pengaturan jumlah Kapasitas Sekolah tentang penerimaan Murid baru dengan mengacu pada permendikbud No.17 Tahun 2017 dengan menghitung Jumlah murid yang ada dengan eksisting ruang kelas dan jumlah sekolah akan di dapatkan jumlah kebutuhan fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Bekasi .dengan perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2 Kebutuhan Sarana Pendidikan SMA, SMK, MA di Kota Bekasi Tahun 2017

No	Jumlah Sekolah SMA,SMK,MA Kota Bekasi(Unit)	Jumlah Ruang Kelas Pada Kota Bekasi 2016	Kelompok Umur Sekolah SMA,SMK,MA 15-19 Tahun Kota Bekasi (Jiwa)	Jumlah Murid yang tertampung di Kota Bekasi (Jiwa)	Kebutuhan Sekolah SMA,SMK,MA Kota Bekasi Tahun 2016 (Unit)
1	224	8,784	242,879	6,194	172

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2017

Keterangan : Standar Kemendikbud N0 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta didik baru.

$K_s = J_s \times 36$ (1 rombongan belajar)
 $= J_{rk}$
 $= R_{us} \times J_s$
 $J_{rk} = K_s$
 K_s : Kebutuhan Sekolah
 J_s : Jumlah Sekolah.
 J_{rk} : Jumlah Ruang Kelas.
 R_{us} : Range Umur Sekolah 15-19 Tahun.

Dapat dilihat Pada Tabel di atas peneliti menggunakan analisis kebutuhan sarana pendidikan Peraturan Kemendikbud No 17 Tahun 2017 tentang penerimaan siswa baru dalam tabel kita dapat melihat perhitungan nyata akan eksisting yang terjadi di kota bekasi dengan kebutuhan sekolah 172 Unit yang telah dihitung oleh peneliti dengan dasar jumlah penduduk range umur dengan dihitung kebutuhan sekolah dan muatan ruang kelas yang telah di atur dalam kemendikbud no 17 tahun 2017 pada kenyataannya jumlah eksisting sekolah di kota bekasi telah melebihi batas. dari jumlah sekolah yang dapat menampung jumlah murid di kota Bekasi.

Aksesibilitas Sebagai Alat Ukur

Aksesibilitas atau tingkat daya hubung dapat diartikan sebagai tingkat kemudahan pencapaian suatu lokasi untuk mencapai atau dicapai dari lokasi lainnya. aksesibilitas atau tingkat daya hubung sebagai alat ukur untuk menilai jangkauan pelayanan fasilitas sosial dan ekonomi yang diukur tiap pusat Kelurahan (pusat pelayanan lokal) ke Pusat Pelayanan Kota Bekasi. Aksesibilitas dipergunakan sebagai alat ukur karena faktor jarak, waktu dan biaya diakomodasikan kedalam model analisis seperti : kondisi jalan, fungsi jalan, rute angkutan tetap dan jarak dari masing - masing pusat pelayanan dengan pusat Pondok Gede (pusat fasilitas social dan ekonomi). Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$I = \frac{K.F.T}{D}$$

Berdasarkan rumus di atas, maka daya hubung (I) setiap lokasi berbanding lurus dengan kondisi jalan (K), nilai fungsi jalan (F) dan rute angkutan umum / jurusan tetap (T). Untuk itu perlu ditentukan besarnya tiap komponen yang terdapat dalam rumus tersebut, antara lain :

- Faktor jarak (D), penilaian faktor jarak digunakan sebagai pembanding tingkat aksesibilitas yang dihitung berdasarkan jarak rata-rata antar zona.
- Faktor kondisi jalan (K), penilaian dilihat dari keadaan fisik jalan seperti permukaan jalan, lebar jalan dan kemiringan jalan. Cara penilaian kondisi jalan : kondisi baik (aspal hotmik) dinilai 3, kondisi sedang (aspal, kerikil, sebagian rusak) dinilai 2, kondisi buruk (jalan tanah, rusak) dinilai 1. Dengan demikian semakin besar nilai setiap kondisi jalan berarti semakin baik kondisi jalannya.
- Faktor fungsi jalan (F), penilaiannya dengan melihat peranan jalan tersebut dalam sistem jaringan jalan didalam suatu kota atau wilayah yaitu jalan arteri primer nilai 3, jalan kolektor sekunder dinilai 2, dan jalan lokal sekunder dinilai 1.
- Faktor alat angkutan (T), angkutan umum dengan rute tetap yaitu untuk angkutan umum bis nilai 3, $\frac{3}{4}$ (elf) dinilai 2, dan koasi, ojek dan jalan kaki dinilai 1. T dapat dicari dengan menggunakan rumus $3x + 2y + 1z$.

Di mana :

X = Rute angkutan umum inter - regional
Y = Rute angkutan umum intra - regional
Z = Rute angkutan umum yang melayani lokal
3,2,1 = Koefisien jenis angkutan umum

Hasil Perhitungan Aksesibilitas

Dari hasil aksesibilitas di atas, masing-masing nilai K, F, T dan D dapat diketahui sebagai berikut :

- Perhitungan aksesibilitas di Kota Bekasi dinilai dari masing - masing sub Pusat Pelayanan dan Pelayanan Lingkungan ke Pusat Pelayanan Kota Bekasi (Kec.Bekasi Timur) yang merupakan Pusat Sekolah Terfavorit yang ada di Kota bekasi karna terdapat SMAN 1 dan MAN 1 dan bersebelahan

dengan Kec.Bekasi Barat Yang memiliki SMKN 1 Kota Bekasi.

- Adanya pembagian zona pada wilayah studi, dimaksudkan untuk mengarahkan dan mempermudah didalam analisis tingkat kemudahan pencapaian (aksesibilitas).

Pembagian zona didasarkan pada batasan administrasi Desa/Kelurahan.

- Pusat zona adalah pusat Desa/Kelurahan.
- Nilai K, F, T dan D dan I.

Tabel 3 Nilai (Aksesibilitas) di Kota Bekasi Tahun 2017

No	Zona	K	F	T	D	I	Ranking
1.	Pondokgede	2	2	3	19	0,63	R
2.	Jatisampurna	2	2	1	24	0,16	R
3.	Pondok Melati	2	2	1	18	0,22	R
4.	Jatiasih	2	2	1	15	0,26	R
5.	Bantargebang	3	2	3	15	1,2	R
6.	Mustika Jaya	2	2	1	9,6	0,41	R
7.	Bekasi Timur	3	2	3	0	18	T
8.	Rawalumbu	2	2	3	6,6	1,81	R
9.	Bekasi Selatan	3	2	1	7,6	0,78	R
10.	Bekasi Barat	3	2	1	9,9	0,60	R
11.	Medansatria	2	2	3	9,9	1,21	R
12.	Bekasi Utara	3	2	1	7,1	0,81	R

Sumber : Analisis Tahun 2017

Keterangan : $I = \frac{K \cdot F \cdot T}{D}$

Kualifikasi : T : 12,6 - 18, S : 6,12 - 12,6 , R : 6,12 - 0,18

Dilihat dari tabel di atas bahwa ranking tertinggi untuk aksesibilitas terdapat di Kota Bekasi dengan dengan nilai 18 dan sisa nya untuk Kecamatan yang lain nya. Karna mempunyai nilai ranking terendah dalam aksesibilitas masing-masing dengan nilai berurut yaitu 0,16 , 0,63 , 0,22 , 0,26 , 0,41, 0,60, 0,63, 0,78, 0,81 ,1,2 ,1,21, dan 1,21.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kota Bekasi dari aspek : analisis indeks sentralitas Marshal , analisis kebutuhan Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Atas Analisis

Peraturan Kemendikbud N0 17 Tahun 2017 tentang penerimaan siswa baru perhitungan jangkauan pelayanan, maka masing-masing aspek dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut

Analisis Indeks Sentralitas Marshall maka didapatkan hasil Orde I : Kecamatan Pondok Gede dan Kecamatan Bekasi Selatan, Orde II : Kecamatan Bekasi Barat, Kecamatan MustikaJaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kec.Bantar Gebang, dan Orde III : Kecamatan Jatisampurna, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Bekasi Utara, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Jatiasih, Kecamatan Bekasi Timur.

Analisis Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Analisis Kebutuhan Ruang Kelas Kebutuhan Jumlah Fasilitas Pendidikan dengan Perhitungan Peraturan

Kemendikbud No. 17 Tahun 2017 telah di dapat jumlah unit yang di butuh kan asalah 172 Unit lebih sedikit dari kondisi eksisting yang dimana kondisi eksisting sekolah di kota bekasi telah melebihi batas. dari jumlah sekolah yang dapat menampung jumlah murid di kota bekasi permasalahan yang terjadi ini berbalik dengan kebutuhan nya tetapi sebaliknya karna jumlah sekolah di kota bekasi telah melebihi batas nya dari kebutuhan nya dari kondisi analisis tersebut dapat terlihat adanya konsentrasi atau pengelompokan fasilitas pendidikan di kota bekasi jumlah penduduk yang terus berkembang akan di tahun-tahun berikutnya pasti akan membutuhkan sarana fasilitas pendidikan yang baru.

Perhitungan Jangkauan pelayanan, dengan metode analisis aksesibilitas dari tiap Kecamatan (Pusat Zona) menuju ke Pusat Pelayanan Kota Kecamatan Bekasi Timur Bahwa yang memiliki ranking tertinggi adalah Kecamatan Bekasi Timur dan yang memiliki ranking terendah (Kecamatan PondokGede, Jatisampurna, Pondok Melati, Bekasi Utara, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Rawalumbu, Bantar Gebang, Mustika Jaya dan Medan Satria dan Jati Asih)

Rekomendasi

Dalam Rangka upaya mewujudkan Kota Bekasi sebagai kota pendidikan maka dari hasil penelitian di atas dapat dilihat ke depannya harus diperlukan melakukan peningkatan sarana dan prasarana dalam segi pendidikan agar dapat bersaing dari sekolah yang lain, mendorong peningkatan pusat pelayanan pendidikan di kecamatan lain agar merata nya fasilitas pendidikan dapat terpenuhi dengan jumlah siswa yang terus bertambah dari kota tetangga dan daya saing untuk kecamatan yang ada mendorong pengembangan aksesibilitas menuju pusat pelayanan pendidikan di Kota Bekasi, mendorong pendistribusian sma agar merata pada kecamatan lain yang dimana meminimalisir perpindahan siswa dari kota bekasi ke area luar Kota Bekasi, mendorong transportasi agar terhubung

dengan fasilitas sarana pendidikan yang baru mau pun lama karna dari tahun ke tahun kebutuhan fasilitas pendidikan terus bertambah, dan mengoptimalkan kelebihan siswa dengan jumlah sarana pendidikan yang ada dan di tentukan dengan tingkat pendistribusiannya agar merata pada setiap sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dalam Jurnal (Jurnal Primer)

Begawatsari, 2016. *Strategi Pengembangan Kawasan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Ditinjau Dari Aspek Ekonomi*. Jurnal Ilmiah Plano Krisna.

Alonso, W. 1964, *Location and Land Use*, Cambridge: Harvard University Press.

Badan Pusat Statistik (BPS), 2015, *Kota Bekasi Dalam Angka*, Pemerintah Kota Bekasi.

Badan Pusat Statistik (BPS), 2016, *Kota Bekasi Dalam Angka*, Pemerintah Kota Bekasi.

De Chiara, Joseph De, Lee E. Koppelman 1975, *Urban Planning and Design Criteria*, Second Edition, Van Nostrand Reinhold Company, New York.

Water Christaller (*Central Place Theory*) dalam Sitohang (1990: 132)

Peraturan/Undang- Undang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 2016, *Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bekasi 2010-2030*, Pemerintah Kota Bekasi.

Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.

Departemen Pendidikan Nasional, *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009*.

Departemen Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang *Standar Sarana dan Prasarana untuk SD, SMP, SMA atau sederajat*.

Departemen Pekerjaan Umum, *Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan Sederhana Tidak Bersusun di Daerah Perkotaan Penyempurnaan terhadap standar Perencanaan Kebutuhan Sarana Pendidikan Cipta Karya*.

Standar Nasional Indonesia, 2004, *Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan*, Jakarta.